



Judul : DPR Sepakat Perubahan APBN
Tanggal : Rabu, 18 Mei 2022
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 11

| POSTUR ANGGARAN 2022 |

DPR Sepakat Perubahan APBN

Bisnis, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan membahas usulan pemerintah mengenai perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, secara terperinci Komisi XI dan pemerintah akan mendesain ulang kebijakan dan ketahanan fiskal APBN 2022 guna merespons dinamika perekonomian global.

“Ini untuk merespon perkembangan perekonomian global yang membebani keuangan negara,” kata dia, Selasa (17/5).

Dasco menambahkan, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.

Secara khusus, DPR me-

nyoroti besarnya risiko dari kenaikan minyak di pasar global yang berimbas pada pembengkakan anggaran subsidi. Tak hanya tahun ini, membengkaknya beban fiskal akibat harga minyak juga akan terasa pada tahun depan.

“APBN 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang terkait minyak bumi,” ujarnya.

Komitmen legislatif ini sekaligus membuka asa bagi pemerintah yang memang berencana untuk mengubah postur APBN 2022 sejalan dengan tingginya inflasi dan adanya dampak rambatan dari ketegangan Rusia-Ukraina.

Perubahan APBN di pertengahan tahun bukanlah strategi baru yang bisa ditempuh pemerintah untuk

menguatkan fondasi ekonomi. Sebelumnya, APBN Perubahan (APBN-P) acap dilakukan.

Akan tetapi, selama pandemi Covid-19 postur anggaran dibuah bukan melalui APBN-P, melainkan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang dilegalisasi oleh UU No. 2/2020.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad menilai, idealnya instrumen yang digunakan adalah APBN-P. Hal itu dilandasi oleh ekonomi yang mengarah ke jalur normal.

Adapun, perubahan dengan Perpres atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) hanya dilakukan dalam kondisi genting. “Kita sudah menuju kondisi kenormalan, jadi [idealnya] APBN-P sehingga ada proses di DPR.”

(Tegar Arief/Wibi Pangestu Pratama)